BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Kesimpulan

Secara keseluruhan manfaat keberadaan MGP dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru pembimbing masih diperlukan (taraf kategori cukup tinggi). MGP sebagai wadah organisasi tingkat kabupaten mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut berperan aktif meningkatkan profesionalisme guru pembimbing yang menjadi anggotanya.

Berdasarkan hasil temuan penelitian dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

1. Kesimpulan Umum

Hasil temuan penelitian didapat manfaat keberadaan MGP terhadap peningkatan profesionalisme guru pembimbing belum optimal. Khususnya yang menjadi kendala kurang optimalnya manfaat keberadaan MGP dirasakan dari segi penyusunan rencana kegiatan/pelatihan dan penentuan materi kegiatan/pelatihan tidak melibatkan guru pembimbing yang menjadi anggota. Sehingga penyusunan rencana kegiatan sampai dengan pemilihan materi menjadi permasalahan diantara anggota dan pengelola MGP. Dengan kata lain perencanaan program kegiatan yang dilaksanakan oleh pengelola MGP di kabupaten Karawang belum mencerminkan kebutuhan yang diperlukan anggota dalam rangka meningkatkan profesionalismenya. Para guru pembimbing yang menjadi anggota merasa posisi pengelola sebagai fasilitator, mediator dan motivator untuk bersama-sama

membantu mengembangkan wawasan, pengetahuan maupun pengalaman profesinya. Selain itu, kondisi wawasan, pengetahuan, kemampuan profesi dan pengalaman akademik yang heterogen diantara guru pembimbing yang ada juga cukup menyulitkan untuk memilih materi yang kira-kira tepat untuk diberikan, sehingga pengelola mengadakan generalisasi kondisi untuk menentukan materi yang akan diberikan.. Sedangkan para guru pembimbing berharap pengelola dapat memilih dan memilah materi sesuai dengan tingkat kebutuhan yang ada di lapangan saat ini. Jadi materi yang diberikan benar-benar bermanfaat untuk digunakan oleh para guru pembimbing dalam melaksanakan tugasnya di sekolah. Selama ini materi yang diberikan merupakan materi dasar yang harus dimiliki oleh mereka yang baru berprofesi sebagai guru pembimbing (materi dasar) sehingga bagi mereka yang telah menguasai akan mendatangkan kejenuhan. Belum lagi, ditambah dengan teknik penyampaiannya yang bersifat konvensional, sehingga materi yang diberikan hanya berupa teori-teori saja tanpa praktek. Jadi dapat dikatakan bahwa materi yang diberikan dalam kegiatan pembinaan belum membahas persoalan-persoalan aktual di lapangan yang berkaitan dengan bidang bimbingan konseling, baru sebatas pembahasan kurikulum bimbingan konseling dan teori, konsep dasar bimbingan konseling yang sebenarnya telah diketahui peserta. Adapun penyebab terjadinya kondisi ini dapat dipahami sebagai dampak keterbatasan anggaran MGP sehingga menyulitkan ruang gerak pengelola untuk mendatangkan narasumber lain yang berasal dari luar MGP serta dari disiplin ilmu yang berbeda tetapi diperlukan sebagai *sharing* oleh guru pembimbing.

Pada pelaksanaan kegiatan/pelatihan ada dominasi narasumber guru inti yang berasal dari lingkungan MGP sendiri, hal ini dikhawatirkan dapat mengganggu interaksi yang ada antara pengelola dan anggota pada umumnya. Narasumber yang berasal dari guru inti bimbingan konseling masih membawa pola lama, dimana mereka menerapkan birokrasi dan senioritas dalam melaksanakan tugas profesinya. Permasalahan yang muncul akhirnya, nara sumber yang berasal dari lingkungan sendiri merasa lebih segala-galanya dari guru pembimbing yang menjadi anggota sehingga tidak ada anggota yang boleh membantah apa yang dikatakan/diinginkannya. Prilaku inilah yang tidak dapat diterima oleh guru pembimbing pada umumnya, karena mereka beranggapan sistem birokrasi dan senioritas tidak dapat diterapkan dalam dunia profesi, tetapi kondisi teman sejawat lebih cocok dan dapat memudahkan untuk mengadakan interaksi sesama anggota dan pengelola. Kondisi inipun disebabkan adanya keterbatasan gerak dari pengelola karena ada peserta senior yang mendominasi.

Sejak awal penyusunan rencana kegiatan/pelatihan tidak mengikut sertakan guru pembimbing yang menjadi anggota MGP, dampak lebih jauh yang dialami di lapangan jadwal kegiatan/pelatihan yang telah disusun tidak semuanya sesuai dengan waktu luang yang dimiliki oleh para anggota, akibatnya jadwal kegiatan/pelatihan tidak berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Sehingga pada saat kegiatan/pelatihan MGP berlangsung tidak dapat diikuti oleh guru pembimbing secara keseluruhan sehingga terkesan tingkat kehadiran anggota MGP masih minim. Disini masih terlihat kepentingan individu yang masuk dalam pengelolaan MGP.Untuk mengatasi permasalahan ini telah diambil suatu

kesepakatan diantara anggota aktif berdasarkan motto MGP bahwa kegiatan yang diselenggarakan MGP adalah dari, untuk dan oleh anggota, sehingga segala permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan MGP, (misalnya penyusunan rencana kegiatan, penyusunan materi dan pencarian narasumber) diambil berdasarkan kesepakatan anggota dengan suara terbanyak.

Selain itu, faktor fasilitas yang menyangkut sarana dan prasarana sampai pendanaan yang masih minim.Dukungan fasilitas sarana, prasarana dan pendanaan bagi terlaksananya suatu kegiatan yang dimiliki MGP kabupaten Karawang saat ini masih minim, meskipun telah mendapat bantuan dari Kelompok Kerja Kepala Sekolah dan Dinas Kependidikan kabupaten Karawang serta iuran anggota. Apabila pembiayaan pelaksanaan kegiatan/pelatihan harus dibebankan kepada anggota, hal ini dirasa cukup memberatkan Kondisi ini membawa dampak pada tingkat kehadiran anggota MGP yang rendah, karena mereka beranggapan untuk mengembangkan wawasan, pengetahuan dan pengalaman yang berkaitan dengan tuntutan tugas di lapangan tidak harus mengeluarkan biaya sendiri. Mereka berharap adanya dukungan dari pengelola MGP untuk mencari solusinya. Karena adanya keterbatasan kemampuan ditambah faktor kesadaran untuk meningkatkan kinerja belum optimal maka terjadilah dampak pada kemampuan menangani masalah di lapangan Permasalahan di lapangan semakin komplek sementara kemampuan professional guru pembimbing masih terbatas akhirnya muncul sikap tidak professional dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, disisi lain faktor untung rugi dipermasalahkan anggota dalam meningkatkan profesionalismenya sehingga menimbulkan rasa enggan. Hal

ini berpengaruh terhadap sikap yang harus dimiliki oleh seorang guru pembimbing dalam upaya memberikan bantuan yang pada akhirnya membawa dampak penanganan masalah tidak tuntas.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA UPT PERPUSTAKAAN 185

2. Kesimpulan Khusus

Berdasarkan beberapa temuan pada kesimpulan umum, ternyata banyak permasalahan-permasalahan yang lebih spesifik lagi yang saling terkait dan merupakan masalah pokok dari kurang berdayanya MGP kabupaten Karawang. Hasil temuan permasalahan tersebut sebagai berikut:

Perencanaan program kegiatan MGP kabupaten Karawang menggambarkan kondisi lemahnya penyusunan program kegiatan. Program kegiatan yang disusun belum memperlihatkan prinsip prioritas kebutuhan di lapangan dalam upaya meningkatkan kualitas kerja, spesifikasi penanganan kasus setempat. Temuan ini didasari oleh hasil studi dokumentasi dimana program kegiatan MGP yang telah dilaksanakan pada periode kepengurusan yang lama dan yang sedang berjalan hanya berkisar pada pemahaman konsep secara teoritik dari teknik dan layanan bimbingan konseling di sekolah, sehingga perkembangan ketrampilan penanganan kasus dianggap lamban bahkan tertinggal.

Sedangkan dari sisi implementasi program kegiatan temuan penelitian menggambarkan bahwa yang direncanakan belum memenuhi harapan anggota dalam upaya meningkatkan profesionalisme yang ditinjau dari aspek ketepatan waktu, materi, metode, sasaran yang ingin dicapai.

Kendala-kendala yang terjadi karena program kegiatan yang disusun pengelola belum sepenuhnya mengacu kepada kebutuhan guru pembimbing di lapangan. Selain itu, ketepatan jadwal pelaksanaan dipengaruhi oleh kondisi sanggar/sekolah pelaksana yang berada agak berjauhan dan sulit untuk ditempuh serta faktor komitmen dan kesadaran diri para anggota MGP dalam upaya pengembangan diri belum terbentuk optimal sehingga mempengaruhi sikap prilaku profesionalismenya.

Selanjutnya, penanganan manajemen bimbingan konseling di sekolah sangat diperlukan dalam inventarisasi data siswa yang peraturan maupun pedoman pengelolaannya sudah ada tetapi belum dapat dilaksanakan. Hal ini kembali kepada kesadaran individu guru pembimbing itu sendiri dalam melakukan penataan pengelolaan administrasi bimbingan konseling sebagai tugasnya yang dilaksanakan secara profesional.

Sampai saat ini masalah yang belum terpecahkan adalah penataan administrasi dan penyusunan instrumentasi bimbingan. Kedua bidang kerja ini dilaksanakan seadanya mengingat fasiltitas di sekolah sangat terbatas. Sehingga perlu dipikirkan kembali oleh para pengelola MGP, K3S dan Koordinator Guru pembimbing di sekolah untuk secepatnya mencarikan solusi agar kedua bidang kerja tersebut secepatnya dapat ditata sehingga dapat membawa dampak positif, yaitu layanan yang diberikan oleh guru pembimbing di sekolah lebih optimal dan profesional. Dan akhirnya tingkat kepercayaan masyarakatpun bertambah.

Hasil temuan yang merupakan gambaran perubahan sistem pengelolaan adalah telah disepakati oleh rapat anggota bahwa untuk kepengurusan MGP

periode 2003/2005 dan seterusnya tidak lagi berdasarkan penunjukkan dari Kanwil/Dinas setempat maupun atas kesepakatan guru inti saja melainkan berdasarkan pemilihan langsung oleh anggota aktif.

Temuan penelitian lainnya mengenai komitmen profesi, upaya pengembangan diri masih cukup tinggi. Mereka menyadari akan profesinya yang menuntut adanya peningkatan hasil kerja sebagai suatu konsekuensi profesi. Sehingga secara internal mereka mau, terbuka dan memiliki keinginan yang tinggi untuk terus menata diri agar memiliki kualitas kerja yang lebih baik lagi.

Guru pembimbing di lapangan merasakan saat ini ratio antara guru pembimbing dengan siswa yang harus dibina berada pada kondisi yang tidak ideal Seharusnya ratio yang ada yaitu 1 : 150. Rasio tersebut menggambarkan kondisi yang ideal Sehingga guru pembimbing di lapangan saat ini merasa beban tugas yang diembannya cukup padat dan berat, yang pada akhirnya tugas-tugas pendukung misalnya masalah penataan administrsi yang harus ditangani tidak dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Mereka menyadari sepenuhnya kemampuan yang mereka miliki saat ini belum memadai dalam upaya melaksanakan tugas di lapangan, sehingga kemampuan ini harus ditingkatkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan, sehingga upaya pemberian bantuan layanan bimbingan konseling yang menjadi beban tugasnya dapat dilaksanakan dengan tepat dan berhasil guna. Tetapi semua ini kembali lagi kepada kondisi individual guru pembimbing yang lebih menekankan untung rugi dalam melaksanakan peningkatan profesionalismenya secara mandiri.

Dari temuan penelitian dapat disimpulkan kebermaknaan dari keberadaan MGP ini menjadi suatu indikator bahwa keberhasilan pengelola dalam upaya mengelola wadah organisasi belum optimal, bahkan boleh dikatakan MGP kabupaten Karawang belum berdaya guna dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru pembimbing. Untuk mengatasi kekurangan MGP dalam meningkatkan kualitas profesi guru pembimbing, MGP kabupaten Karawang masih perlu diberdayakan

Pada kondisi MGP yang ada di kabupaten karawang perlu dipikirkan untuk membentuk kelompok-kelompok kecil yang mengkaji dan mengembangkan materi-materi pokok dalam kegiatan MGP untuk terus ditingkatkan dengan menambah informasi-informasi baru yang perlu disampaikan kepada anggota MGP selanjutnya sebagai langkah evaluasi juga diperlukan kelompok pengawas dan penilai intern yang fungsinya sebagai Evaluator dan pemberi masukan dalam menindaklanjuti kegiatan MGP..

Pemberdayaan MGP kabupaten Karawang mencakup dua aspek tinjauan yaitu : 1) dari sisi pengelola, 2) dari sisi guru pembimbing yang menjadi anggota MGP. Dari sisi pengelola masih diperlukan adanya pengembangan pemahaman, keterbukaan dalam berkomunikasi untuk dapat mengelola MGP secara profesional. Pengelola sebagai pembina wadah organisasi secara sadar harus mau membuka diri untuk berkomunikasi serta mau menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif dan inovatif bagi kemajuan bersama. Selain itu, sebagai pengelola wadah organisasi diharapkan dapat menghilangkan sifat egoisme dan

mau benar sendiri dalam mengelola wadah organisasi yang bersifat dari, untuk dan oleh anggota.

B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan-temuan penelitian tentang pemberdayaan MGP dalam upaya meningkatkan profesionalisme guru pembimbing, baik dilihat dari kebutuhan guru pembimbing dalam rangka meningkatkan kualitas kinerjanya maupun dari peranan MGP sendiri dalam rangka ikut berperan aktif meningkatkan profesionalisme para guru pembimbing yang menjadi anggota binaannya dirasa sangat memerlukan keterbukaan dan persamaan persepsi dalam mengelola semua kegiatan yang diperuntukan bagi guru pembimbing anggota MGP tersebut. Dari temuan-temuan tersebut dapat dikemukakan rekomendasi MGP tingkat kabupaten untuk dapat bekerjasama dengan ABKIN harus sudah memikirkan terobosan baru dalam upaya membantu meningkatkan profesionalisme guru pembimbing di lapangan secara mandiri dengan membuat suatu wadah pendidikan dan pelatihan (diklat) maupun kursus singkat yang bersifat swadaya dengan program kegiatan utamanya meningkatkan profesionalisme guru pembimbing mengenai kualitas kinerja layanan.

Rekomendasi dalam bentuk program peningkatan profesionalisme guru pembimbing disusun berdasarkan asumsi bahwa peningkatan kinerja guru pembimbing tentang layanan profesi akan berdampak langsung terhadap kebermaknaan hasil kerja di lapangan. Guru pembimbing yang memiliki tingkat kemampuan yang memadai semakin merasa memiliki rasa percaya diri dan

motivasi berprestasi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan yang selanjutnya akan berpengaruh positif pada pelaksanaan tugas layanan di sekolah. Apabila keadaan yang demikian dapat tercapai, maka membawa dampak positif pada kepercayaan masyarakat terhadap profesi guru pembimbing.

Adapun disain program hasil masukkan guru pembimbing dalam rangka mengembangkan kemampuan dan meningkatkan keterampilan yang mereka butuhkan untuk melaksanakan tugas dalam kondisi saat ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Program

Tujuan program peningkatan profesionalisme guru pembimbing adalah sebagai berikut:

a Bagi Pengelola MGP

1. Dapat memperoleh pedoman dan adanya relevansi program yang satu dengan lainnya dalam rangka meningkatkan kemampuan profesi guru pembimbing secara bertahap dan optimal.
2. Dapat mempersiapkan diri dalam menggunakan pendekatan, model maupun strategi yang sesuai dengan karakteristik masalah, sasaran dan menyesuaikan berbagai keterbatasan-keterbatasan finansial, kemampuan serta fasilitas pendukung lainnya.
3. Dapat mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana penunjang lainnya demi kelancaran program kegiatan peningkatan kemampuan profesi guru pembimbing yang menjadi anggotanya.

b. Untuk Guru Pembimbing

1. Dapat mempersiapkan diri dengan lebih memadai melalui berbagai cara guna memperlancar kegiatan peningkatan kemampuan profesi yang menjadi tanggung jawabnya.
2. Dapat dijadikan suatu pedoman untuk mempelajari pengetahun dan keterampilan sesuai dengan kebutuhan lapangan.
3. Supaya dapat ikut memberikan masukkan dalam memilih materi pelatihan peningkatan profesi guru pembimbing secara langsung melalui wadah kegiatan profesi teman sejawat.

2. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program peningkatan kemampuan profesi adalah sebagai berikut:

a. Peserta adalah guru pembimbing yang memiliki latar belakang pendidikan D. III dan S1 Bimbingan Penyuluhan.

b Tempat pelaksanaan kegiatan tergantung pelaksana kegiatan atau atas permintaan anggota.

c. Sarana dan perlengkapan penunjang diusahakan sesuai dengan kebutuhan pelatihan untuk kelancaran dan terpenuhinya target pelatihan secara optimal.

3. Sistem Pelatihan

Sistem yang digunakan untuk meningkatkan profesionalisme guru pembimbing menggunakan pendekatan partisipatif dengan menekankan pada pemberdayaan potensi guru pembimbing yang menjadi anggota MGP, bersama-sama menyusun perencanaan program kegiatan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan yang diperlukan mereka dilapangan. Khususnya pada kemampuan keterampilan teknik dan strategi layanan hendaknya

diimplementasikan dalam kegiatan nyata di sekolah sebagai sarana latihan dan evaluasi penanganan kasus, sehingga mereka benar-benar mampu menguasai keterampilan yang seharusnya mereka perlukan dalam proses pelayanan bimbingan dan konseling. Proses pelatihan lebih menekankan dari, oleh dan untuk anggota, dengan kata lain sebagai nara sumber/pelatih diambil dari anggota sendiri dan nara sumber ahli dari luar lingkungan MGP, sehingga benar-benar mereka menjalankan "sharing" maupun "peer consultative" untuk saling meningkatkan kemampuan profesinya.

4. Isi Program

Isi program peningkatan profesionalisme guru pembimbing untuk MGP kabupaten Karawang sesuai temuan hasil penelitian, sebagai berikut:

A. Masalah Pokok

1. Wawasan Bimbingan Konseling

- Fungsi Bimbingan Konseling
- Prinsip Bimbingan Konseling
- Azas Bimbingan Konseling

Catatan: materi diberikan untuk mengingatkan kembali/menyegarkan guru pembimbing akan profesinya (sesuai kebutuhan)

2. Bidang-bidang Bimbingan Konseling

- Layanan Orientasi (khususnya yang berkaitan dengan melanjutkan studi)
- Bimbingan Belajar (kesulitan belajar dan penerapan disiplin untuk berprestasi)
- Bimbingan Karir (pekerjaan sampai dengan jabatan)

- Bimbingan Sosial dan kematang kepribadian

3. Jenis-jenis Layanan

- Layanan Orientasi
- Layanan Informasi
- Layanan Penempatan dan Penyaluran (karir)
- Layanan Pembelajaran (kesulitan belajar dan peningkatan prestasi)
- Layanan Konseling Perorangan dan Khusus
- Layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok

B. Kegiatan Pendukung

- Penyusunan dan Penyempurnaan Instrumentasi Bimbingan Konseling
- Aplikasi Instrumentasi Bimbingan Konseling
- Penataan Administrasi Bimbingan Konseling
- Pelaksanaan Home Visit
- Tahapan Pelaksanaan Alih Tangan Kasus
- Pelaksanaan Konferensi Kasus
- Pelaksanaan Penanganan Kasus Khusus (narkoba, kehamilan diluar nikah, perlecehan seksual dan kejiwaan)
- Pelaksanaan observasi langsung, studi banding, studi komparasi dan kunjungan antar instansi terkait.
- Pemanfaatan Narasumber di luar lingkungan MGP
- Penjajakan kerjasama dengan instansi terkait untuk pelatihan penanganan kasus-kasus khusus yang sudah banyak memasuki dunia pendidikan.

Selain itu, karena guru pembimbing di lapangan merasa beban tugas sudah cukup berat dengan melihat rasio 1 guru pembimbing untuk lebih dari 150 orang siswa, diharapkan pihak pemerintah dapat membuka kesempatan untuk pengangkatan calon guru pembimbing sehingga rasio tersebut di atas dapat diperkecil dan realistis.

Alternatif lainnya pemerintah dapat membuat kembali "crass program" untuk pengadaan guru bimbingan penyuluhan melalui jalur Diploma III maupun pendidikan alih fungsi misalnya dari guru bidang studi mendapat pelatihan selama satu tahun untuk difungsikan sebagai guru bimbingan konseling.danuntuk menanggulangi kebutuhan guru pembimbing khususnya di kabupaten Karawang dengan kondisi keterbatasan anggaran dan adanya kebijaksanaan pemerintah pusat dapat ditanggulangi dengan pengadaan "guru kontrak" yang bekerja sama dengan pemerintah daerah.